

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur yang digunakan sebagai landasan teori serta pembanding dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan literatur dalam penelitian ini akan membandingkan dari berbagai macam sumber. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan pendidikan pengungsi anak di Yunani dan keterlibatan UNHCR didalamnya. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa penelitian berupa jurnal-jurnal melalui internet. Perbandingan akan berfokus pada kasus pengungsi, peran UNHCR dan program pendidikan pengungsi anak.

Para pengungsi menghadapi sejumlah tantangan ketika mereka meninggalkan negara asal mereka untuk mencari tempat yang aman dan perlindungan. Tantangan ini dapat berkisar dari kesulitan fisik hingga tekanan emosional, ditambah dengan proses yang rumit dalam mencari suaka di negara baru. Perjalanan seorang pengungsi sering kali penuh dengan rintangan, membuat situasi mereka yang sudah sulit menjadi lebih menantang. Katsigianni Victoria dan Kaila Maria menekankan peristiwa ini dalam tulisannya dengan judul "*Refugee Education in Greece: A Case Study in Primary School*". Victoria dan Maria menyoroti tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi, termasuk rasa takut dan rasa ketidakpercayaan, terutama oleh masyarakat setempat, yang mereka hadapi akibat penggambaran yang cenderung bersifat negatif oleh media.

Kedua penulis kemudian menguraikan beberapa tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan pengungsi di Yunani. Tantangan-tantangan ini termasuk kebutuhan akan kerangka kerja sekolah yang efektif

untuk mendidik anak-anak pengungsi dalam jumlah besar, penolakan awal dan kurangnya persiapan dari negara dan komunitas lokal, serta resistensi sosial yang menghalangi penerimaan dan solidaritas di dalam komunitas sekolah itu sendiri. Studi kasus artikel ini berfokus pada sebuah sekolah dasar di daerah Piraeus, Attica selatan, yang berfungsi sebagai *Reception Centres for Refugee Education* (DYEP). Pengalaman sekolah para pengungsi anak dari Januari 2016 hingga Juni 2018 didokumentasikan melalui buku harian, pertemuan, dan analisis yang mendalam. Victoria dan Maria mengungkapkan bahwa terdapat kesulitan diawal dan kurangnya persiapan negara untuk mengintegrasikan pengungsi-pengungsi anak (Victoria & Maria, 2019a).

Integrasi pengungsi di Eropa, dan lebih khusus lagi di Yunani, telah menjadi isu yang menonjol dalam beberapa tahun terakhir karena jumlah pengungsi yang mencari suaka terus meningkat. Integrasi pengungsi sendiri merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek dari dimensi hukum, sosial, hingga politik. Integrasi pengungsi di Eropa dipengaruhi oleh *Civic Turn* atau perubahan kewarganegaraan dalam kebijakan integrasi migran, yang tercermin dalam norma-norma Uni Eropa dan kebijakan beberapa negara anggota. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara dan penguasaan bahasa dan budaya negara tuan rumah. Dia Anagnostou dalam tulisannya, "*Local Government and Migrant Integration in Europe and in Greece*", meneliti peran penting pemerintah daerah dalam integrasi migran, dengan fokus khusus pada Yunani.

Di Yunani sendiri, peran pemerintah kota dalam masalah migrasi telah digarisbawahi secara signifikan oleh meningkatnya migrasi dan krisis pengungsi pada tahun 2015-2016. Selama periode ini, Yunani menjadi negara transit bagi lebih dari 1.000.000 migran dan pengungsi, banyak di antaranya terdampar di Yunani setelah penutupan perbatasan utara pada awal Maret 2016. Hal ini menyebabkan kota-kota di daerah yang menjadi titik penerimaan atau tempat tinggal para pengungsi berada di bawah tekanan yang

semakin besar untuk mendirikan bangunan-bangunan penerimaan, akomodasi, dan mungkin juga untuk integrasi jangka panjang. Anagnostou mengatakan bahwa Yunani sebagai anggota Uni Eropa tentunya dipengaruhi oleh norma-norma Uni Eropa dan *Civic Turn* dalam kebijakan integrasi imigran (Anagnostou, 2016).

Fenomena Arus besar pengungsi ke Yunani cukup menarik perhatian Dunia, seperti yang dibahas dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul “*Living in Refugee Camps in Northern Greece*” ditulis oleh Symeon Mavridis dan Savvoula Mouratidou, dalam penelitiannya Mavridis dan Mouratidou berfokus pada fenomena kedatangan besar-besaran migran dan pengungsi dari berbagai negara di Yunani, terutama selama krisis ekonomi akut yang melanda Yunani. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis seberapa efektif langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan krisis pengungsi ini. Akan tetapi, pemerintah Yunani yang tidak memiliki pengalaman serupa dan dengan anggaran yang terbatas pemerintah telah melakukan sebuah upaya untuk menghadapi jumlah migran dan pengungsi yang terus meningkat.

Tidak hanya itu, pada tahun 2016 Uni Eropa membuat keputusan untuk menutup perbatasan di Yunani utara namun hal ini tidak efektif dan memperburuk masalah. Adapun upaya dari gelombang solidaritas, yang sebagian besar terdiri dari aparatur negara, LSM dan inisiatif individu, jelas dan membantu, namun tidak dapat mengubah secara signifikan kehidupan kehidupan sehari-hari di kamp-kamp atau menghentikan pendatang baru yang tidak teratur. Dengan data yang sebagian besar berasal dari pegawai yang bekerja di kamp-kamp pengungsi di Yunani utara dan juga dari literatur yang relevan, maka peneliti menganalisis fenomena kehidupan di kamp-kamp pengungsi di Yunani untuk memberikan solusi yang tepat bagi imigrasi ilegal dan tidak teratur yang lebih luas di Eropa (Mavridis & Mouratidou, 2019).

Dijelaskan pula oleh Ivi Daskalaki dan Nadina Leivaditi melalui sebuah jurnal yang berjudul “*Education and Hospitality in Liminal Locations for Unaccompanied Refugee Youths in Lesbos*” bahwa terjadinya penutupan

perbatasan disepanjang "rute Balkan" dan perjanjian Uni Eropa-Turki pada tahun 2016 mengakibatkan ribuan pengungsi dengan terpaksa tidak dapat keluar dari Yunani. Maka sejak saat itu, bantuan-bantuan darurat berskala besar di pantai Yunani telah digantikan oleh pengembangan ketentuan untuk integrasi pengungsi secara bertahap. Pengembangan yang dimaksud ini berupa, Pendidikan karena menjadi hal utama dalam pengelolaan "krisis pengungsi" di Eropa.

Selain itu artikel ini mengeksplorasi pendidikan para pengungsi dalam rangka akomodasi "sementara". Serta untuk anak usia dibawah umur berada di tempat penampungan transit tanpa adanya pendamping yang letaknya di Pulau Lesbos. Lalu artikel ini membahas bagaimana pengungsi dengan rentang usia dari remaja hingga dewasa, para pengasuh atau penjaga camp pengungsi mereka memberikan Pendidikan secara mandiri dengan keterbatasan, dan pengasuh atau penjaga camp pengungsi menginformasikan sebuah "kode" *fi loxenia* (keramahan kepada orang asing). Dengan tujuan kode ini untuk memposisikan para pengungsi sebagai "tamu" sementara dan sekaligus sebagai "subjek" disiplin di tempat penampungan dan di masyarakat yang lebih luas (Daskalaki & Leivaditi, 2018).

Melihat keprihatinan atas fasilitas pendidikan anak usia dini di tempat pengungsian Yunani, maka melalui tulisannya Marit Heldal, Trond Løge Hagen, Ingvild Olsen Olaussen dan Gry Mette D. Haugen yang berjudul "*Social Sustainable Education in a Refugee Camp*" bertujuan untuk membahas bagaimana lembaga pendidikan dan Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD) di kamp pengungsian dapat memberi perhatian lebih pada pendidikan sosial yang berkelanjutan. Serta ide dan praktik pedagogis yang inovatif di dalam lembaga PAUD Yunani yang harus terus dilakukan, maka para penulis melalui artikel ini berpendapat bahwa dengan mengembangkan konsep-konsep pendidikan merupakan cara untuk mempromosikan pendidikan sosial yang berkelanjutan.

Artikel ini berdasarkan dari sebuah lembaga PAUD, dimana anak-anak yang tinggal di kamp pengungsi dan anak-anak Yunani berada ditempatkan didalam satu tempat yang sama. Maka dengan kondisi lingkungan serta alam sebagai mediator budaya yang sama dengan begitu dapat berfungsi sebagai kerangka kerja pedagogis, dan anak-anak dapat membuat pengalaman baru berdasarkan partisipasi, kesetaraan, dan saling menghormati. Melalui data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dan satu wawancara kelompok dari Maret 2019 hingga September 2019, mengungkapkan bahwa ada tiga dimensi yang disarankan para penulis sebagai penanda untuk praktik pedagogis sosial yang berkelanjutan diantaranya: pentingnya alam dan bermain sebagai fasilitator untuk kegiatan anak-anak, selain itu pentingnya partisipasi dan kesetaraan, serta pentingnya komitmen kepada masyarakat (Heldal et al., 2021).

*Tabel 2.1 Tinjauan Literatur*

| No | Judul  | Penulis                              | <i>Mind Finding</i>   |
|----|--|--------------------------------------|---|
| 1  | <i>Refugee Education in Greece: A Case Study in Primary School</i> | Katsigianni Victoria dan Kaila Maria | Pendirian <i>Reception Centres for Refugee Education</i> di beberapa sekolah dasar dan menengah terpilih di Yunani telah menjadi inisiatif penting untuk memfasilitasi akses anak-anak pengungsi ke sistem pendidikan nasional, dengan menekankan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar. Penolakan awal dan reaksi negatif dari beberapa penduduk lokal terhadap integrasi siswa pengungsi ke dalam komunitas sekolah |

|   |  |                       |   |
|---|--|-----------------------|---|
|   |  |                       | <p>menyoroti tantangan yang dihadapi dalam mempromosikan inklusivitas dan penerimaan. Namun, dengan dukungan dari organisasi internasional, pemerintah daerah, dan guru, upaya untuk mengurangi reaksi negatif dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai di antara para siswa dari budaya yang berbeda telah menunjukkan hasil yang positif.</p>  |
| 2 | <p><i>Local Government and Migrant Integration in Europe and in Greece</i></p> | <p>Dia Anagnostou</p> | <p>Meskipun kebijakan imigrasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah nasional, integrasi migran sebagian besar terjadi di tingkat lokal, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab secara administratif untuk menangani tuntutan dan dampak migrasi. Dokumen ini memberikan seperangkat kriteria dan metodologi untuk menilai kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan integrasi migran di Yunani dan negara-negara lain, yang bertujuan untuk mengevaluasi undang-undang nasional, peraturan daerah, dan proyek-proyek yang mempromosikan integrasi</p> |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 3 | Living in Refugee Camps in Northern Greece  | Symeon Mavridis dan Savvoula Mouratidou | Artikel ini membahas tantangan dan kondisi yang dihadapi oleh para migran dan pengungsi yang tinggal di kamp-kamp di daerah Yunani bagian Utara. Artikel ini menyoroti masuknya migran dan pengungsi secara signifikan ke Eropa, khususnya Yunani, karena berbagai faktor global. Artikel ini menekankan kepadatan dan kondisi kehidupan yang buruk di kamp-kamp pengungsi, serta dampak psikologis terhadap penghuninya, terutama anak-anak. Kedua penulis juga membahas tantangan yang dihadapi oleh para pencari suaka dalam mengakses pendidikan dan kesempatan kerja, dan menekankan perlunya layanan dukungan khusus seperti penerjemah, psikolog, dan pekerja sosial untuk membantu integrasi dan kesejahteraan mereka. sementara menjadi penduduk tetap daerah tersebut. |
| 4 | Education and Hospitality in Liminal Locations for Unaccompanied Refugee Youths in Lesbos | Ivi Daskalaki dan Nadina Leivaditi      | Dokumen ini menggarisbawahi peran penting pendidikan dalam kehidupan para pengungsi anak, terutama dalam konteks situasi transit yang berkepanjangan. Kedua ponulis juga kemudian membahas bagaimana pemerintah Yunani,  |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   | <p>dalam menghadapi krisis pengungsi, mengalihdayakan aspek-aspek pendidikan pengungsi kepada agen-agen internasional dan LSM, salah satunya dengan menunjuk UNHCR sebagai agen koordinator. UNHCR, bersama dengan organisasi-organisasi seperti UNICEF dan Save the Children, telah berperan penting dalam menyediakan layanan pendidikan non-formal bagi para pengungsi, termasuk pendidikan remedial dan kegiatan-kegiatan rekreasi. Namun, dokumen tersebut mencatat bahwa layanan pendidikan ini tidak memiliki standarisasi dan sistematisasi, yang mengarah pada kurikulum dan pendekatan yang beragam. Hal ini menyoroti peran pendidikan yang terus berkembang dalam pengelolaan krisis pengungsi serta pergeseran persepsi pengungsi yang awalnya merupakan tamu kemudian terintegrasi menjadi masyarakat local.</p> |
| 5 | Social Sustainable Education in a Refugee Camp | Marit Heldal, Trond Løge Hagen, Ingvild | <p>Artikel ini berfokus pada promosi pendidikan sosial yang berkelanjutan di kamp pengungsian melalui lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Studi ini</p>  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  | <p>Olsen<br/>Olaussen,<br/>dan Gry<br/>Mette D.<br/>Haugen</p> | <p>menekankan pentingnya alam dan permainan sebagai fasilitator untuk kegiatan anak-anak, dengan menyoroti peran praktik ilmu pengetahuan dalam menciptakan lingkungan yang mengayomi. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi, kesetaraan, dan rasa saling menghormati di antara anak-anak, serta menekankan perlunya para pendidik untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan inklusivitas. Dengan menyatukan anak-anak lokal dan migran, lembaga PAUD ini bertujuan untuk menyediakan platform untuk pengalaman dan interaksi yang beragam, yang pada akhirnya mempromosikan pendidikan sosial yang berkelanjutan di lingkungan yang penuh tantangan yang ditandai dengan keanekaragaman budaya dan perselisihan politik.</p> |
|--|--|--|---|

Sumber: Peneliti

Berdasarkan analisis lima tinjauan literatur diatas, ditemukan bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara tinjauan literatur dan penelitian yang diteliti. Meskipun kelimanya sepakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak pengungsi dan mengakui peran yang dimainkan oleh UNHCR

dalam menyediakan akses pendidikan dan dukungan, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus dan cakupan penelitian. Beberapa jurnal lebih menitikberatkan perhatian pada peran pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah daripada UNHCR, sementara yang lain memperluas cakupan untuk membahas aspek sosial, kesehatan, dan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan anak-anak pengungsi. Terdapat juga perbedaan dalam skala geografis, dengan beberapa penelitian hanya memusatkan perhatian pada satu daerah tertentu di Yunani, seperti Lesbos, tanpa memperhatikan konteks nasional secara keseluruhan. Dengan demikian, kesimpulannya menunjukkan bahwa sementara ada titik kesamaan yang signifikan, keragaman dalam fokus penelitian dan skala geografis menekankan pentingnya memahami dinamika lokal dan multidimensionalitas isu pendidikan anak pengungsi di Yunani secara menyeluruh.

## **2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual**

### **2.2.1 Teori Liberalisme Institusional**

Liberalisme merupakan sebuah perspektif terkemuka dalam Hubungan Internasional yang menekankan pentingnya kerja sama, saling ketergantungan, dan promosi akan nilai-nilai bersama di antara negara-negara dalam membentuk politik global. Pemikiran ini mengacu pada keyakinan bahwa promosi akan nilai-nilai demokrasi serta perlindungan hak asasi manusia bersifat krusial untuk mendorong perdamaian dan kerja sama antar negara. Akar dari liberalisme dalam Hubungan Internasional dapat ditelusuri kembali pada periode Pencerahan di abad ke-17, dimana para tokoh pemikir, seperti John Locke, menentang gagasan tradisional mengenai otoritas dan hierarki, dan kemudian mengadvokasikan hak-hak individu, demokrasi, serta supremasi hukum (Jackson & Sørensen, 2022).

Pemikiran Liberalisme sendiri hadir dengan tujuan menentang perspektif realisme yang didasarkan pada asumsi bahwa *state* adalah aktor utama dalam sistem internasional dan pada dasarnya berorientasi pada sifat *self-interest* dan berusaha memaksimalkan *power* dan keamanan mereka

sendiri. Sedangkan perspektif liberal memandang sifat manusia pada dasarnya baik dan menginginkan perdamaian serta keharmonisan diantara bangsa-bangsa dunia. Immanuel Kant pada akhir abad ke-18 berpendapat bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai liberal tidak akan memiliki alasan untuk berperang satu sama lainnya. Menanggapi pendapat Kant, Stephen McGlinchey dan Dana Gold berargumen meskipun liberalisme bertujuan untuk menciptakan dunia yang damai dan harmonis, liberalisme tidak menjamin ketiadaan perang secara keseluruhan, melainkan kepada peranan liberalisme dalam berkurangnya potensi akan terjadinya konflik seiring dengan munculnya negara-negara demokrasi yang lebih liberal (McGlinchey & Gold, 2022).

Dalam konteks liberalisme dan sistem suaka, Bryan Garsten dalam "*The Liberalism of Refuge*" mengeksplorasi ketegangan antara komitmen terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan negara. Garsten membahas perlunya model suaka berbasis hak yang dapat ditegakkan oleh negara-negara berdaulat dengan cara menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi ketika mencari suaka di negara-negara liberal dengan langkah-langkah mengontrol perbatasan (Garsten, 2024). Kemudian dalam menanggapi isu pendidikan anak-anak pengungsi di Yunani, pendekatan liberal menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak semua individu, dalam hal ini terkhusus anak-anak, terlepas dari status anak-anak ini sebagai pengungsi.

Kemudian pada tahun 1970-an, muncul sebuah perspektif teoritis yang berakar pada filosofi liberal, yakni Liberalisme Institusional yang pertama kali digagas oleh Robert Keohane dan Joseph Nye. Keohane dan Nye menyatakan bahwa *state* mencari keuntungan absolut melalui kerja sama dan bahwa organisasi beserta rezim internasional dapat mendorong terciptanya kerja sama ini. Gagasan inti dari Liberalisme Institusional adalah bahwa negara dapat menanggulangi konflik dan peperangan dengan membentuk institusi yang mempromosikan nilai-nilai dan norma-norma bersama,

layaknya demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Institusi-institusi ini dipandang sebagai mekanisme bagi negara-negara untuk mengikat diri mereka pada pengambilan keputusan kolektif dan untuk menahan perilaku mereka, sehingga mengurangi kemungkinan konflik antarnegara (Johnson & Heiss, 2023).

Rebecca Devitt dalam artikelnya yang berjudul "*Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*", mengkaji secara kritis peran Liberalisme Institusional dalam Hubungan Internasional. Devitt menyoroti efek dari globalisasi yang telah memberikan dampak yang signifikan terhadap teori HI, sehingga sampai pada tahap dibutuhkan perspektif institusional yang memperhitungkan struktur masyarakat internasional, pengaruh dari adanya norma dan nilai, serta peran politik domestik dan juga gerakan global. Terlepas dari keterbatasannya, Devitt percaya bahwa institusionalisme liberal tetap memberikan kontribusi yang berharga bagi teori HI, terutama dengan fokusnya pada norma, prinsip, dan peran organisasi internasional yang terus berubah (Devitt, 2011).

Menyikapi isu pengungsi, Liberalisme Institusional menawarkan pendekatan kooperatif melalui organisasi dan rezim internasional untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi. Hal ini termasuk mempromosikan norma dan prinsip seperti *Responsibility to Protect* (R2P) dan intervensi kemanusiaan, yang mempertanyakan kedaulatan negara dan mengadvokasikan tindakan kolektif untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Disamping itu, Liberalisme Institusional juga mengakui dampak dari kekuatan dan kebijakan domestik terhadap kerja sama internasional, teori ini menyoroti pengaruh permintaan publik dan jaringan advokasi terhadap bagaimana negara terlibat dalam isu pengungsi di ranah internasional.

Liberalisme Institusional berpendapat bahwa institusi internasional dapat difungsikan sebagai *platform* untuk kerja sama dan kolaborasi antara negara dan aktor lainnya. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) merupakan salah satu contoh dari institusi yang didedikasikan

untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi di seluruh dunia. UNHCR bertugas melindungi dan memastikan hak-hak pengungsi dapat terpenuhi, termasuk hak akan pendidikan, terutama di negara-negara yang menampung lebih banyak pengungsi dari negara-negara lain, seperti halnya dalam kasus ini Yunani yang dapat dikatakan sebagai pintu gerbang ke Eropa (Johnson & Heiss, 2023).

UNHCR diharapkan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip universalitas dan netralitas, yang merupakan inti dari Liberalisme Institusional. Dalam konteks Yunani, UNHCR akan bekerja sama dengan pemerintah Yunani, organisasi internasional lainnya, juga lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak pengungsi dengan tujuan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem pendidikan nasional atau menyediakan tempat pendidikan alternatif bila diperlukan. UNHCR dalam beberapa kasus juga membantu pendirian program-program pendidikan sembari membangun kapasitas negara tuan rumah seperti Yunani untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak pengungsi (Forsythe, 2001).

### **2.2.2 Global Governance**

*Global Governance* dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem aturan, institusi, dan praktik yang memandu serta mengatur hubungan internasional dan kerja sama di antara negara-negara dunia. Konsep *Global Governance* muncul sebagai respons terhadap meningkatnya keterkaitan dan ketergantungan negara-negara di dunia, yang mengharuskan adanya tindakan kolektif untuk mengatasi tantangan bersama dan mempromosikan nilai-nilai bersama. Thomas G. Weiss, seorang ilmuwan terkemuka di bidang Hubungan Internasional, mendefinisikan *Global Governance* dalam bukunya yang berjudul “*Global Governance: Why? What? Whither?*” sebagai upaya kolektif oleh *state*, *international organization*, dan *non-state actor* lainnya dengan tujuan menangani tantangan dan peluang bersama yang melampaui batas negara. Weiss juga menyoroti pentingnya memahami kerangka kerja

lima kesenjangan dalam pengetahuan, norma, kebijakan, institusi, dan kepatuhan sebagai tugas-tugas penting untuk mencapai lebih banyak ketertiban, stabilitas, prediktabilitas, dan kemakmuran dengan distribusi manfaat yang lebih adil bagi dunia internasional (Weiss, 2013).

Dalam kerangka *Global Governance*, *state*, *international organization*, dan *non-state actor* berinteraksi dengan cara yang kompleks dan dinamis. *State*, terlepas dari tingkat *power* dan *influence* yang berbeda-beda, tetap menjadi *main actor* dikarenakan kedaulatan dan perannya dalam menciptakan serta mematuhi hukum internasional. *International organization*, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaganya, menyediakan *platform* untuk diplomasi dan kerja sama multilateral yang berfungsi sebagai arena dimana *state* dan *non-state actor* dapat terlibat dalam upaya bersama untuk mengatasi tantangan global. *Non-state actor*, termasuk NGO, MNC, dan kelompok masyarakat sipil, telah menjadi kian berpengaruh dengan partisipasinya dalam mengarahkan sistem politik dan kontribusinya pada proses pengambilan keputusan. Para aktor ini sering kali membentuk kemitraan dan jaringan untuk mencapai tujuan bersama, dibantu oleh *international organization* dalam memfasilitasi interaksi (Karns et al., 2015).

Terkait UNHCR selaku sebuah organisasi internasional, *Global Governance* memandang *international organization* sebagai komponen yang bersifat krusial dalam upaya kolektif *state* dan *non-state actor* untuk mengatasi tantangan global yang melampaui batas-batas negara. Organisasi internasional dipandang sebagai struktur formal dan informal yang memfasilitasi kerja sama dan pengelolaan urusan bersama. *The Commission on Global Governance* mendefinisikan *governance* sebagai "*the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs*," dengan menekankan peran organisasi internasional dalam memfasilitasi proses-proses ini (Carlsson, 1995). Kemudian Barnett dan Finnemore juga berpendapat bahwa organisasi internasional bervariasi dalam hal keanggotaan, cakupan subjek, aturan, sumber daya, dan tingkat

birokratisasi, yang mana aspek-aspek ini memengaruhi efektivitas dan cara mereka menjalankan fungsinya (M. Barnett & Finnemore, 2005).

Menyangkut isu pengungsi, mekanisme *Global Governance* bersifat krusial dalam memberikan perlindungan, bantuan, dan solusi bagi para pengungsi di seluruh dunia. Weiss memaparkan dalam tulisannya mengenai pentingnya *global governance* dalam menangani isu pengungsi, Weiss menyoroti kekuatan ide dan norma dalam membentuk perilaku yang patuh dan perlunya perspektif dan tindakan global yang berkelanjutan, strategis, dan berjangka panjang, untuk mengatasi hambatan dalam aksi kolektif yang efektif. Kerangka kerja *global governance*, seperti konvensi dan perjanjian internasional, membantu menetapkan norma dan standar perlakuan terhadap pengungsi dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi. Disamping itu, mekanisme *global governance* memfasilitasi kerja sama antar negara untuk berbagi beban dalam menampung pengungsi dan memberikan dukungan bagi integrasi mereka ke dalam komunitas baru.

Laura Barnett dalam "*Global Governance and The Evolution of The International Refugee Regime*" membahas tantangan yang dihadapi oleh rezim pengungsi internasional, khususnya dalam UNHCR dan perannya dalam menangani isu-isu pengungsi. Barnett menekankan perlunya rezim pengungsi beradaptasi dengan meningkatnya arus pengungsi dan peningkatan pembatasan diantara negara-negara anggota. Ia juga kemudian menyoroti kompleksitas yang dihadapi oleh negara-negara dalam memasukkan kewajiban internasional ke dalam kebijakan nasional mereka, serta diperlukannya badan pengawas internasional untuk mengelola rezim tersebut (L. Barnett, 2002).

Dalam konteks pendidikan anak-anak pengungsi di Yunani, UNHCR, selaku badan utama dari PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi, memainkan peran penting dalam mengadvokasi dan mendukung inisiatif pendidikan untuk anak-anak pengungsi secara global. Esensi dari *Global Governance* adalah mengatasi tantangan global yang kompleks melalui kerja

sama dan koordinasi diantara berbagai aktor. Dalam kasus pendidikan anak-anak pengungsi di Yunani, prinsip-prinsip *Global Governance* akan menekankan perlunya pendekatan yang terkoordinasi untuk memastikan bahwa anak-anak yang rentan ini memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas meskipun mereka mengungsi (Sinclair, 2012).

Organisasi internasional sendiri dapat didefinisikan sebagai entitas yang didirikan melalui perjanjian formal diantara beberapa negara untuk menangani kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Organisasi-organisasi ini membantu menetapkan norma, aturan, dan regulasi yang memandu perilaku negara serta mengatur interaksi global. Organisasi-organisasi ini juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar negara dengan menyediakan *platform* untuk dialog dan resolusi konflik. Pierre Gerbet, seorang sejarawan dan profesor terkemuka dari Prancis, berpendapat bahwa tujuan organisasi internasional adalah untuk menetapkan aturan dan tatanan dalam Hubungan Internasional dengan membina hubungan yang berkelanjutan antara pemerintah atau kelompok sosial yang melintasi batas-batas negara. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai badan permanen yang terpisah dari lembaga-lembaga nasional dan memiliki karakteristik unik yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menangani kepentingan dan tantangan bersama dalam skala global. (Gerbet, 1977).

Sejak didirikannya, UNHCR telah menjadi *key player* dalam komunitas kemanusiaan internasional, mereka telah bekerja sebisa mungkin dalam kapasitas mereka untuk menyediakan tempat tinggal, pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan krusial lainnya bagi para pengungsi yang membutuhkan. UNHCR hingga saat ini telah beroperasi di lebih dari 135 negara dan sebagai sebuah IGO, UNHCR telah memainkan perannya dalam *Global Governance*. Mereka bekerja sama dengan pemerintah, badan-badan PBB lainnya, serta NGO dengan tujuan mengatasi tantangan-tantangan kompleks yang dihadapi oleh para pengungsi. Kegiatannya meliputi menyediakan bantuan kemanusiaan, perlindungan, dan advokasi bagi para

pengungsi, serta mengoordinasikan upaya-upaya untuk memastikan penyediaan layanan-layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal (Ayu Putri & Zulhair Achsin, 2023).

### **2.2.3 Pengungsi**

Dalam sejarah manusia, perpindahan individu ataupun sekelompok orang karena terjadinya konflik, penganiayaan, dan bencana alam merupakan hal yang lumrah dijumpai. Kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan pengungsi dan sering kali berkelana jauh dari tempat asal mereka sembari mencari tempat perlindungan dan rasa aman. Selama berabad-abad, peperangan, konflik, dan kerusuhan politik terus mengusir orang-orang dari rumah dan tanah air mereka. Krisis pengungsi mencapai puncaknya ketika Perang Dunia II, ketika jutaan orang mengungsi akibat kehancuran dan penderitaan yang meluas hampir di seluruh belahan dunia (Kleist, 2017).

Konsep pengungsi merupakan salah satu fundamental dalam bidang Hubungan Internasional dikarenakan konsep ini melibatkan interaksi antar negara serta tanggung jawab mereka terhadap individu maupun kelompok yang membutuhkan perlindungan dan dukungan. Konsep pengungsi tidak dapat dipisahkan dengan konsep hak asasi manusia, karena pada hakekatnya pengungsi sendiri adalah individu atau kelompok yang telah dirampas dari hak-hak dasar dan kebebasannya di negara asal mereka. Maka dari itu, masyarakat internasional memiliki kewajiban moral untuk melindungi dan mendukung para pengungsi, serta memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan aman terlepas dari rasa takut.

Pietro Verri, seorang historian terkemuka dari Italia mendefinisikan pengungsi dengan mengutip Pasal 1 Konvensi PBB tahun 1951 tentang status pengungsi sebagai berikut: "*applies to any person who fled the country of his nationality to avoid persecution or threat of persecution*". Definisi ini menunjukkan bahwa pengungsi dapat diartikan sebagai semua orang yang meninggalkan negaranya untuk menghindari penganiayaan atau ancaman

akan penganiayaan (Agustine, 2016). Maka dari itu pendapat Verri, sesuai dengan Konvensi PBB 1951 menekankan bahwa mereka yang melarikan diri di dalam negaranya tidak dapat disebut sebagai pengungsi seperti dalam Konvensi 1951.

Konsepsi yang berlaku, sesuai dengan instrumen internasional, mengidentifikasi pengungsi sebagai seseorang yang telah melintasi batas negara karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Namun, Andrew E. Shacknove melalui jurnalnya yang berjudul "Who Is a Refugee?" menggali kompleksitas dalam mendefinisikan konsep pengungsi. Shacknove menantang penekanan tradisional pada penganiayaan dan keterasingan sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan status pengungsi. Ia berpendapat bahwa ketiadaan perlindungan negara terhadap kebutuhan dasar warga negara adalah hal yang merupakan negasi masyarakat yang sebenarnya dan menjadi dasar dari status pengungsi. Shacknove menekankan bahwa pengungsi adalah individu-individu yang kebutuhan dasarnya tidak dilindungi oleh negara asalnya, tanpa ada jalan lain selain mencari bantuan internasional, dan berada dalam situasi yang memungkinkan untuk mendapatkan bantuan internasional (Shacknove, 1985).

#### **2.2.4 Hak Anak**

Hak anak mengacu pada hak-hak dasar dan perlindungan yang secara inheren dimiliki oleh seluruh anak diseluruh dunia tanpa memandang ras, kebangsaan, status sosial mereka, agama, atau aspek apapun, sebagaimana diakui oleh hukum hak asasi manusia internasional. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan anak, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi, akses ke layanan kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Dalam skala internasional, Hak-hak ini tercantum dan diabadikan didalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) atau Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lundy, 2012).

UNCRC merupakan perjanjian hak asasi manusia internasional yang menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa anak-anak diperlakukan dengan bermartabat, hormat, dan kesetaraan. Konvensi ini menguraikan hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak, serta menempatkan kewajiban pada pemerintah untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak ini. UNCRC diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. UNCRC telah diratifikasi oleh 196 negara, hal ini menyebabkan UNCRC sebagai perjanjian hak asasi manusia internasional yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah internasional.

Diantara banyaknya hak anak yang tercantum dalam UNCRC adalah hak atas pendidikan yang tercantum didalam Pasal 28 konvensi tersebut. UNCRC menekankan bahwa pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam perkembangan seorang anak dan pendidikan juga bukanlah sekedar hak asasi manusia yang mendasar, namun juga memainkan peran penting dalam memberikan anak-anak pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Hak ini harus diupayakan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk anak-anak dari kelompok yang terpinggirkan dan rentan seperti pengungsi (Thomas, 2016).

Meskipun begitu, pada kenyataannya masih terdapat banyak anak pengungsi yang menghadapi tantangan signifikan dalam mengakses pendidikan karena hambatan bahasa, bahkan diskriminasi. Maka dari itu, penting bagi negara tuan rumah dan organisasi internasional untuk memastikan bahwa anak-anak pengungsi mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas dan kemudian mengupayakan integritas mereka terhadap komunitas lokal dimana mereka ditempatkan. Oleh karena itu, memastikan hak-hak anak pengungsi untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya merupakan kewajiban hukum

tetapi juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan peluang masa depan mereka (Covell et al., 2010).

### **2.3 Asumsi Penelitian**

Program *Emergency Support to Integration and Accommodation* (ESTIA) telah digunakan oleh UNHCR serta Pemerintahan Yunani sebagai sebuah upaya untuk menyediakan akses terhadap pendidikan yang layak bagi pengungsi-pengungsi anak, sebagaimana akses pendidikan merupakan salah satu hak fundamental dari hak-hak seorang anak. Dengan adanya upaya memenuhi hak anak akan pendidikan maka dapat dikatakan bahwa UNHCR beserta pemerintah Yunani memiliki rasa tanggung jawab serta kepedulian akan hak-hak anak sebagaimana dicantumkan dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) (Lundy, 2012).

Ditinjau berdasarkan konsep *Global Governance*, maka UNHCR selaku sebuah *international organizations* yang ditugaskan untuk mengayomi dan melindungi para pengungsi secara global diharuskan mengedepankan kerja sama dengan aktor lainnya baik *state actor* maupun *non-state actor* dalam menangani isu pengungsi internasional. UNHCR dalam hal ini mengadvokasikan tindakan kolektif bersama pemerintahan Yunani dalam mengemban *Responsibility to Protect* (R2P). UNHCR dalam kasus ini dapat dikatakan bertindak sebagai platform untuk mengadvokasikan kerja sama dengan Yunani beserta mitra-mitra lainnya dan diharapkan dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip universalitas dan netralitas (Forsythe, 2001).

## 2.4 Kerangka Analisis

Gambar 2. 1

### Kerangka Analisis

